

ANALISIS KESEJAHTERAAN SOSIAL KARYAWAN SWASTA DALAM KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP PENGANGGURAN DI KOTA MEDAN TAHUN 2019-2022

Widia Kartika Sari Sianturi¹

Magister Ilmu Administrasi, Universitas HKBP Nommensen

widia.sianturi06@gmail.com¹⁾

Info Artikel

Diterima : 12 November 2022

Revisi : 24 November 2022

Terbit : 28 Desember 2022

Key words:

Social Welfare, Regency/City
Minimum Wage, Unemployment

Kata Kunci:

Kesejahteraan Sosial, UMK,
Pengangguran

Corresponding Author :

Widia Kartika Sari Sianturi¹

Email:

widia.sianturi06@gmail.com¹⁾

Abstract

Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was established in 1945 to provide certainty, order and legal protection for every Indonesian citizen, one form of providing social welfare to the community. "Basic law article 27 paragraph (2) concerning Every country has the right to work and a decent living for humanity". And "Law article 33 paragraph (1) concerning the economy is compiled as a business based on kinship. Where people have the right to choose their work and the state guarantees the social welfare of the community.

By carrying out an analysis from researchers from 2019-2022 there were fluctuations in the number of open unemployment in the city of Medan, recorded in August 2022 reduced to 8.89% with an increase in the district/city minimum wage of 1.22% in 2022. And there was an increase in the minimum wage in in 2023 of Rp. 3.624.117.59 with a percentage increase of 7.52%. So the community of workers or laborers will no longer have difficulties in social welfare in their lives and this inflation will not affect the social welfare of the community with the increase in the Medan district/city minimum wage.

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah ditetapkan pada tahun 1945 untuk memberi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi tiap-tiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kesejahteraan social kepada masyarakat. "Undang-undang dasar pasal 27 ayat (2) tentang Tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"¹. Dan "Undang-undang pasal 33 ayat (1) tentang perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas kekeluargaan"². Dimana masyarakat berhak memilih atas pekerjaannya dan negara menjamin kesejahteraan social masyarakat.

Dengan dilakukannya analisis dari peneliti dari tahun 2019-2022 terjadinya fluktuasi jumlah pengangguran terbuka di kota Medan tercatat di bulan Agustus 2022 berkurang menjadi 8,89% dengan kenaikan upah minimum kabupaten/kota sebesar 1,22% tahun 2022. Dan adanya kenaikan upah minimum di tahun 2023 sebesar Rp. 3.624.117.59 dengan presentase naik sebesar 7,52%. Maka masyarakat pekerja atau buruh tidak kesulitan lagi di dalam kesejahteraan social di dalam hidupnya dan inflasi tersebut tidak mempengaruhi kesejahteraan social masyarakat dengan adanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota Medan.

¹ Undang-undang Dasar 1945

² Undang-undang Dasar 1945

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah ditetapkan pada tahun 1945 untuk memberi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi tiap-tiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kesejahteraan social kepada masyarakat.

“Undang-undang dasar pasal 27 ayat (2) tentang Tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”³. Dan “Undang-undang pasal 33 ayat (1) tentang perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas kekeluargaan”⁴. Dimana masyarakat berhak memilih atas pekerjaannya dan negara menjamin kesejahteraan social masyarakat.

Tiap tahun yang menjadi pokok permasalahan ialah pengangguran. Pengangguran adalah masalah yang belum dapat teratasi oleh pemerintah akibat adanya inflasi pertahun. Daerah yang sejahtera adalah daerah yang perekonomiannya bertumbuh dengan baik dalam bidang pembangunan, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Peningkatan pengangguran yakni indicator yang digunakan untuk memperkirakan kemajuan suatu daerah, dapat disimpulkan perekonomian daerah tersebut semakin buruk. Terhambatnya pembangunan berskala panjang yang diakibatkan peningkatan pengangguran pada daerah tersebut dan akan menjadi beban bagi keluarga yang akan melahirkan kemiskinan dan menumbuhkan peningkatan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Inflasi ialah factor dari pengangguran, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara global dan kontinu dalam berskala waktu spesifik⁵. Indeks inflasi pada setiap tahun menambah indeks pengangguran tinggi dan berpengaruh kepada taraf kesejahteraan hidup masyarakat. (Mankiw, 2012)⁶ Kurva Philips Bagi daerah yang berperekonomiannya baik maka indeks inflasi tersebut rendah, namun ada juga daerah yang indeks inflasi nya tinggi disebut *hyperinflation* (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014). Dikatakan *hyperinflation* jika suatu daerah tersebut tumbuh indeks pengangguran secara intens dan harga barang dan jasa pada sector menjadi mahal, maka perusahaan mengambil keputusan untuk mengurangi tenaga kerja. Dan mengakibatkan pengangguran yang tinggi.

Pada penelitian yang dilakukan (Silaban et al., 2020) secara parsial Produk Domestik Rill Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2003-2019, yang artinya setiap indeks PDRB akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara pada tahun 2003-2019. penelitian yang dilakukan (Nuzulaili, 2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB dan UMP

³ Undang-undang Dasar 1945

⁴ Undang-undang Dasar 1945

⁵ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>

⁶ Mankiw, N.(2012), *Pengantar Ekonomi Makro (Edisi Asia)*, Salemba Empa

Terhadap Pengangguran Di pulau Jawa 2017-2020 menunjukkan bahwa variable inflasi negative dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di pulau Jawa pada tahun 2017 dan variable UMP memiliki hubungan negative dan signifikan terhadap pengangguran di pulau Jawa tahun 2017-2020. Sedangkan, penelitian yang dilakukan (Bintang & Prana, 2020) yakni menunjukkan variable secara parsial inflasi tidak berpengaruh dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,681 >$ dari nilai alpha $0,05$ sama dengan yang dilakukan penelitian (Arief & Fadhilah, 2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variable inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.

Penelitian ini diselenggarakan di Kota Medan yang jumlah penduduknya sebesar 2.229.408 jiwa. Pada setiap tahunnya jumlah penduduk akan bertambah dan akan menjadi subjek bahwa indeks pengangguran pada tahun 2019-2022 bertambah berdasarkan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (Alam, 2009; Indradewa & Natha, 2015)⁷. Dengan fluktuasi indeks pengangguran yang selalu meningkat, seperti mana indeks inflasi memperoleh fluktuasi dan cenderung memperoleh penurunan dengan ini indkes inflasi menjadi kecil maka akan mengurangi indeks pengangguran di sisi lain masalah ini menjadi pusat perhatian dan perbaikan kepada pemerintah baik sector yang terlibat untuk dianalisis indeks pengangguran supaya tidak mejadi beban untuk masyarakat sehingga perlu dilakukan penelitian indeks pengangguran ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesejahteraan social karyawan swasta dalam kenaikan upah minum terhadap indeks pengangguran di Kota Medan pada tahun 2020-2022.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana tujuannya untuk mengetahui transformasi Upah Kenaikan Minimum yang harus diketahui dalam pemberian upah kenaikan minimum untuk mensejahteraan kehidupan tiap-tiap masyarakat di kota Medan.

Bahan Penelitian

Sebagai studi literatur, maka data yang digunakan peneliti untuk mencakup dan menjelaskan bahan data sekunder, primer, maupun tersier penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan dari dokumen yang ada dan menjadi acuan seperti buku-buku, hasil penelitian terdahulu dari Pengaruh Kesejahteraan Sosial Karyawan

⁷ Alam, A. S. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 81-96.

Terhadap Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota, berbagai jurnal-jurnal, artikel-artikel *website*, pendapat pakar dan komentator berbagai kalangan mengenai kesejahteraan social terhadap kenaikan upah minum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan social merupakan disiplin ilmu yang didasarkan pada kesistematiskan yang terpadu upaya kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keterampilan (*body of skill*), dan kerangka nilai (*body of value*) yang berujud membantu individu, kelompok masyarakat, dan organisasi social upaya mengembangkan seluruh potensi dan sumber yang ada dalam rangka mengembangkan kesejahteraan social. Menurut (Suharto, 2011)⁸ Kesejahteraan social adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh Lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah social, dan peningkatan kualitas hidup individu.

Pada Undang-undang Dasar pasal 33 ayat (1) tentang perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas kekeluargaan⁹. Jelas dikatakan masyarakat pekerja layak menerima kesejahteraan social dari upah yang diterima selama bekerja di perusahaan maupun di bidang pemerintahan. Pemerintah Ketenagakerjaan.

Menurut (Fahrudin, 2012)¹⁰ ada 2 tujuan kesejahteraan social yaitu :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, Kesehatan, dan relasi-relasi social yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

(Fahrudin, 2012)¹¹, juga merangkum tentang jenis usaha kesejahteraan social yakni :

1. Layanan yang langsung ditunjukkan ke kelompok/ komunitas sasaran yang dikenal dengan nama Direct Service. Misalnya saja, suatu lembaga pelayanan masyarakat mengembangkan program pengembangan modal usaha dan berbagai macam model pemberian bantuan keanugan untuk komunitas (*income generating activities*),

⁸ Suharto, E. (2011). Kebijakan sosial. Bandung: Alfabeta.

⁹ Undang-undang Dasar 1945

¹⁰ Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT. Refika Aditama.

¹¹ Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT. Refika Aditama.

program bea siswa untuk anak yang tidak mampu dan sebagainya. Di sini semua layanan yang dilakukan oleh lembaga ditunjukan langsung pada komunitas sasaran.

2. Adalah layanan yang tidak langsung diarahkan pada komunitas sasaran, tetapi bantuan diberikan pada lembaga yang mempunyai program langsung ke komunitas sasaran. Bentuk layanan ini dikenal dengan Indirect Services, misalnya suatu lembaga donor internasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan angka kematian bayi (infant mortality rate) maka lembaga tersebut mengontak berbagai organisasi pelayanan masyarakat (human service organization)

Fungsi-Fungsi Pekerja Sosial

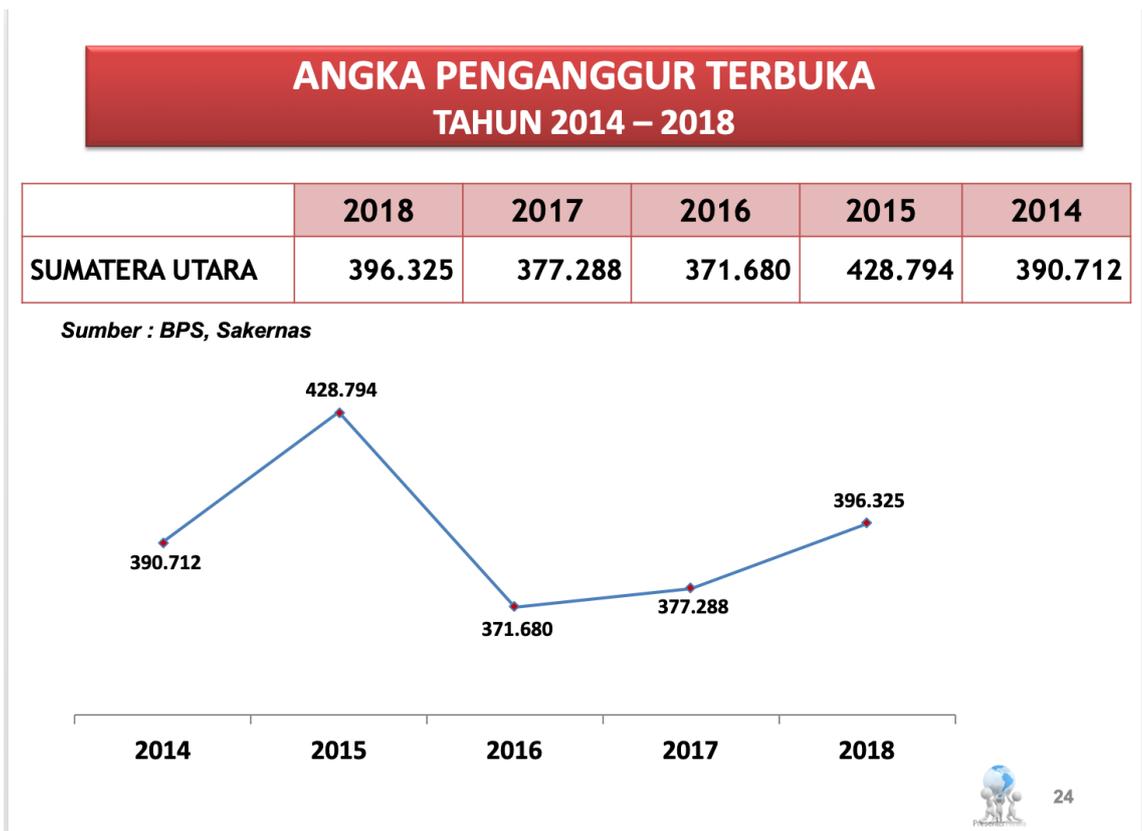
Pekerja sosial merupakan profesi yang bergerak dalam pelayanan pertolongan profesional yang memiliki tugas pokok membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan jalan memberikan berbagai kemungkinan agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Dalam (Iskandar, 2013)¹² tentang fungsi-fungsi pekerja sosial :

- a. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga sistem ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
- b. Menjamin tingkat subsistensi, kesejahteraan yang wajar dan memadai bagi semua orang.
- c. Memberikan kemungkinan kepada orang agar mereka dapat berfungsi sosial secara optimal dalam peranan dan status kelembagaan sosial mereka.
- d. Mendukung dan memperbaiki tertib sosial serta struktur kelembagaan masyarakat.

Pengangguran di Kota Medan

Indeks kredit pengangguran di kota Medan selalu meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang kotinu yang menjadi pusat perhatian dan evaluasi Menteri Ketenagakerjaan khususnya pengangguran di Kota Medan. Dapat dilihat dari Gambar 1.

¹² Iskandar, J. (2013). *Supervisi Pekerjaan Sosial*. Puspaga Bandung.



Gambar 1. Angka Pengangguran Pada Tahun 2014- 2018

Sumber. BPS, Sakernas

Dapat kita lihat pada gambar 1. Bahwa angka pengangguran pada tahun 2014-2018 terjadinya fluktuasi. Pada tahun 2014-2015 terjadi nya peningkatan dari 390.712 jiwa menjadi 428.794 jiwa pengangguran di kota medan. Pada tahun 2016 penurunan pengangguran menjadi 371.680 jiwa. Pada tahun 2017 terjadi sedikit peningkatan menjadi 377.288 jiwa dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan dengan memperoleh angka 396.325 jiwa pengangguran di kota medan.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kab/Kota (Persen)

Kabupaten Kota	2019	2022	2021
Sumatera Utara	5.41	6.91	6.33
Nias	1.09	3.49	3.12
Mandailing Natal	6.37	6.50	6.12
Tapanuli Selatan	4.17	4.42	4.00
Tapanuli Tengah	7.26	7.54	7.24
Tapanuli Utara	1.33	2.94	1.54

Toba Samosir	1.26	2.50	0.83
Labuhan Batu	5.70	6.05	5.66
Asahan	6.86	7.24	6.39
Simalungun	4.39	4.58	4.17
Dairi	1.58	1.75	1.49
Karo	1.09	1.83	1.95
Deli Serdang	5.74	9.50	9.13
Langkat	5.30	7.02	5.12
Nias Selatan	2.25	4.15	3.91
Humbang Hasundutan	0.33	0.84	1.94
Pakpak Bharat	0.19	1.93	1.36
Samosir	1.25	1.20	0.70
Serdang Bedagai	4.37	5.54	3.93
Batu Bara	6.69	6.48	6.62
Padang Lawas Utara	3.21	3.11	3.19
Padang Lawas	4.24	4.11	4.07
Labuhanbatu Selatan	4.80	4.90	4.71
Labuanbatu Utara	5.84	6.82	5.71
Nias Utara	3.07	4.54	3.00
Nias Barat	1.63	1.71	0.74
Sibolga	7.40	8.00	8.72
Tanjungbalai	6.82	6.97	6.59
Pematangsiantar	11.09	11.50	11.00
Tebing Tinggi	8.60	9.98	8.37
Medan	8.53	10.74	10.81
Binjai	6.14	8.67	7.86
Padangsidempuan	4.34	7.45	7.18
Gunungsitoli	5.59	5.94	4.80

Pada Tabel 1. Dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kab/Kota (Persen) di kota Medan pada tahun 2019 sebesar 8.53 %, pada tahun 2020 angka pengangguran di Kota Medan ialah 10.74 % yang dimana terjadi kenaikan sebesar 2,21 % dari tahun 2019. Dan pada tahun 2021 dimana angka pengangguran sedikit mengalami kenaikan sebesar 10.81 %. Kenaikan angka kredit tersebut sebesar 0.07 %.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Sumatera Utara, mengatakan tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan pada bulan Agustus 2022 terjadinya penurunan angka pengangguran menjadi 8,89 %(Said, 2022)¹³

¹³ <https://sumut.antaranews.com/berita/510281/tingkat-pengangguran-terbuka-di-kota-medan-turun-jadi-889-persen>

Tabel 2. Angka Pengangguran Terbuka di Kota Medan Tahun 2022

Kabupaten Kota	2019	2022	2021	2022
Medan	8.53	10.74	10.81	8.89

Sumber. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Dari tabel 2. Dapat terlihat terjadinya penurunan angka pengangguran dari tahun 2021 sebesar 10,81% menjadi 8,89 % tahun 2022. Penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,17 %

Kota Medan telah berhasil membuat angka kredit pengangguran menurun di masa pandemic Covid-19 tahun 2019. Menteri ketenagakerjaan dari 2019-2022 bersinergi mengatasi angka pengangguran terbuka ini di masa pandemic dipengaruhi oleh ekonomi semakin membaik, kebijakan pemerintah, dan pademi covid-19 yang melandai.

Upaya Pemerintah menanggulangi angka pengangguran

Pemerintah telah memberikan program-program upaya menurunkan angka kredit pengangguran di Kota Medan. Program-program yang telah diberikan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk dioptimalkan serta program penurunan tingkat pengangguran sudah dilaksanakan. Adapun program Menteri ketenagakerjaan untuk memulihkan sector ketenagakerjaan akibat pandemic covid-19 yang telah dilaksanakan ialah:

1. Pelatihan vokasi dengan metode *blender training*
2. Pemagangan di industry
3. Pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja
4. Sertifikasi kompetensi
5. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri
6. Penempatan tenaga kerja di luar negeri
7. Pelatihan wirausaha baru
8. Inkubasi bisnis
9. Padat karya
10. Gerakan pekerja sehat
11. Bantuan subsidi Upah

Peningkatan Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota

(Indradewa & Natha, 2015)¹⁴ Pada setiap tahun nya permasalahan mendasar dari setiap seluruh provinsi di Indonesia ini bahkan di antar negara di belahan duni ini adalah Upah atau yang di sebut gaji. Dengan terjadi nya inflasi yang terjadi pada tiap tahun dengan mempengaruhi konsumen primer, sekunder dan tersier tidak tercukupinya upah/gaji, akan tetapi tiap negara mempunyai cara penanggulangan dan peraturan yang berbeda sesuai kebijakan pemerintah di masa orde tersebut. Para pekerja atau buruh mempunyai tanggungjawab untuk menghidupi kehidupannya sendiri bahkan keluarganya bergantung pada gaji/upah tersebut. Oleh dengan kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota tersebut para pekerja atau buruh serikat selalu mengharapkan kebijakan pemerintah untuk menaikkan upah minimum Kabupaten/Kota yang lebih besar dari tahun sebelumnya untuk meningkatkan taraf kehidupannya (Sinaga, 2008)¹⁵.

Dengan adanya kenaikan bahan pangan akibat adanya inflasi di setiap seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah bersinergi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 ayat (1) tak terkecuali Gubernur Sumatera Utara.

Tabel 3. Kenaikan Upah Minum di Kota Medan Pada tahun 2018-2022

Kabupaten Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Medan	2.749.074	2.969.824	3.222.556	3.329.867	3.370.645

Dapat di lihat dari tabel 3. Pada tahun 2018 upah/gaji sebesar Rp. 2.749.074, Pada tahun 2019 terjadinya kenaikan upah sebesar Rp. 2.969.824 dengan presentase 8,03%. Pada tahun 2020 di masa awal pandemic covid-19 pemerintah juga menaikkan upah minimum Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.222.556 dengan presentase 8,51%. Pada tahun 2021 pandemi covid-19 menghantam perekonomian di Indonesia terkhususnya di kota Medan dan pemerintah tetap menaikkan upah minimum Kabupaten/Kota gaji/upah sebesar Rp. 3.329.867 walaupun tidak banyak kenaikan terjadi dengan presentase 3,33% seperti tahun sebelum covid-19 terjadi. Dan pada tahun 2022 terjadinya krisis eknomi dan inflasi terjadi dan pemerintah tetap menaikkan upah minimum Kabupaten/Kota gaji/upah sebesar Rp. 3.370.645 dengan angka presentase 1,22%.

Karena dampak pandemic covid-19 ini masyarakat juga masih banyak masyarakat yang menganggur dan para perusahaan mengurangi jumlah para pekerja atau buruh atau bahkan ada beberapa perusahaan gulung tikar atau bangkrut karena terjadi nya krisis ekonomi ini. Untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah menaikkan taraf hidup agar kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan

¹⁴ Indradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2015). *Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, 4(8), 923-950.

¹⁵ Sinaga, T. (2008). Kebijakan Pengupahan di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 3(2).

cara menaikkan upah minimum Kabupaten/Kota Medan sebesar Rp. 3.624.117,59 dengan presentase naik sebesar 7,52%.

KESIMPULAN

Dengan dilakukannya analisis dari peneliti dari tahun 2019-2022 terjadinya fluktuasi jumlah pengangguran terbuka di kota Medan tercatat di bulan Agustus 2022 berkurang menjadi 8,89% di masa pandemic covid-19 dengan kenaikan upah minimum kabupaten/kota sebesar 1,22% tahun 2022. Dan adanya kenaikan upah minimum di tahun 2023 sebesar Rp. 3.624.117,59 dengan presentase naik sebesar 7,52%. Maka masyarakat pekerja atau buruh tidak kesulitan lagi di dalam kesejahteraan social karyawan swasta di dalam hidupnya dan inflasi tersebut tidak mempengaruhi kesejahteraan social masyarakat dengan adanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota Medan.

Walaupun covid-19 ini mempengaruhi ekonomi masyarakat di kota Medan pemerintah tetap memberikan kehidupan masyarakat yang terbaik dengan programnya seperti : Pelatihan vokasi dengan metode *blender training*, Pemagangan di industry, Pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja, Sertifikasi kompetensi, Penempatan tenaga kerja di dalam negeri, Penempatan tenaga kerja di luar negeri, Pelatihan wirausaha baru, Inkubasi bisnis, Padat karya, Gerakan pekerja sehat dan Bantuan subsidi Upah.

Disarankan pemerintah memberikan perhatian dan juga action atau tindakan yang menaikkan kesejahteraan social masyarakat dengan menaikkan upah minimum kabupaten/kota dengan memperhatikan masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Dengan program yang telah dilakukan dan bahkan program yang akan dibuat dengan tahun berikutnya atau tahun 2022 terjadi nya krisis ekonomi pada semua sector baik di dalam pemerintahan bahkan sector swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 81-96.
- Arief, M., & Fadhilah, D. (2017). *Pengaruh Pendapatan Terhadap Kemiskinan Dan Pengangguran Dengan Inflasi Sebagai Pemoderasi Di Sumatera Utara*. Jurnal Ilman, 5(2), 66-79.
[Http://Journals.Synthesispublication.Org/Index.Php/Ilman](http://Journals.Synthesispublication.Org/Index.Php/Ilman), DOI: <http://dx.doi.org/10.35126/ilman.v5i2.16>
- Bintang, S. Y., & Prana, R. R. (2020). *Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Medan*. Civitas: Jurnal Studi Manajemen, 2(2), 97-100.
[Https://Journals.Synthesispublication.Org/Index.Php/Civitas/Article/View/156](https://Journals.Synthesispublication.Org/Index.Php/Civitas/Article/View/156)
- Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan Apbn. (2014). *Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi Dan Pengangguran (Kurva Phillips) Di Indonesia*. APBN Induk, 23-31.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT. Refika Aditama.

- Inradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2015). *Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, 4(8), 923–950.
- Iskandar, J. (2013). *Supervisi Pekerjaan Sosial*. Puspaga Bandung.
- Mankiw, N. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro (Edisi Asia)*. Salemba Empa.
- Nuzulaili, D. D. (2022). *Analisis Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Ump Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa 2017-2020*. Jurnal Ilmu Ekonomi Jie, 6(2), 228–238. <https://doi.org/10.22219/Jie.V6i2.20473>
- Said, M. (2022). *Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Medan Turun Jadi 0,089 Persen*. Antara News Sumut. <https://sumut.antaranews.com/berita/510281/tingkat-pengangguran-terbuka-di-kota-medan-turun-jadi-889-persen>
- Silaban, P. S. M., Sembiring, I. P. S. B., & Sitepu, V. A. B. (2020). *Analisis Pengaruh Pdrb Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Sumatera Utara Periode 2003-2019*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 11(02), 127–132.
- Sinaga, T. (2008). *Kebijakan Pengupahan Di Indonesia*. Jurnal Ketenagakerjaan, 3(2).
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan Sosial*. Alfabeta.